

Pemerintah
Kabupaten pamekasan



Renja

RENCANA KERJA

KABUPATEN PAMEKASAN





Pemerintah
Kabupaten pamekasan

**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2023, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Sekretariat DPRD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Sekretariat DPRD tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman



Pemerintah
Kabupaten pamekasan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, Juli 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PAMEKASAN

MASRUKIN, S.Sos., M.Si
NIP. 19691104 199003 1 005
Pembina Utama Muda



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1	
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematikan Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional	16
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan	17
2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Isu Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2023	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1	
3.3 Program dan Kegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB V PENUTUP	27



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Faktor Penyebab Tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Sekretariat DPRD	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 Kabupaten Pamekasan	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan	15
Tabel 2.4	Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Pamekasan	19
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Pamekasan	20
Tabel 3. 1	Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pamekasan	22
Tabel 3. 2	Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD	22
Tabel 3. 3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Pamekasan Sekretariat DPRD	24
Tabel 4. 1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	26



Pemerintah
Kabupaten pamekasan

DAFTAR GAMBAR



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Sekretariat DPRD memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Sekretariat DPRD 2023 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Sekretariat DPRD ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Sekretariat



DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Sekretariat DPRD tahun lalu dan evaluasi hasil Sekretariat DPRD tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Sekretariat DPRD; pembahasan Rancangan Renja Sekretariat DPRD; perumusan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD untuk tahun Ke lima periode Renstra Sekretariat DPRD 2018-2023 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Sekretariat DPRD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2023, Renstra Sekretariat DPRD, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Sekretariat DPRD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 18. Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);



19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031



- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E); o
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
 34. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting.
 35. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan 2023 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.



Adapun tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Sekretariat DPRD
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematisan Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematisasi dokumen Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematisasi Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Kabupaten Pamekasan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Kabupaten Pamekasan
- 3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2023.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.



Dari hasil evaluasi, Sub Kegiatan Pada Tahun 2021 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Pelaksanaan Medical Check Up
4. Penyusunan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
5. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
6. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
7. Penyusunan Tata Tertib DPRD
8. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
9. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
10. Pelaksanaan Reses

Adapun Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
9. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

Tabel 2. 1

Faktor Penyebab Tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

No.	Faktor capaian Sub kegiatan tidak sesuai target	Faktor capaian Sub kegiatan sesuai target	Solusi yang dilakukan
1.	Adanya himbauan dari pemerintah dikarenakan Covid 19 terkait pembatasan kegiatan diluar kota (PPKM)	Agenda dilaksanakan tepat waktu	Proses perencanaan dibuat lebih baik dan terencana lagi



2.	Banyaknya anggota DPRD yang tidak melakukan cek lab dikarenakan terkendala waktu	Penganggaran sudah sesuai yang diharapkan	
3.	Adanya kesalahan sub detail rincian dalam proses pemasukan di SIPD		
4.	Kunjungan Kerja dalam daerah tidak terlaksana karena kurangnya waktu		
5.	Usulan raperda belum dipansuskan		

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per 31 Desember 2021

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Serapan anggaran 76.41%.
2. Ada Sub Kegiatan yang tidak melakukan serapan anggaran sama sekali atau 0%.
3. Ada nya kegiatan yang harus dilaksanakan di tahun berikutnya dikarenakan adanya penundaan pelaksanaan yaitu pemilihan Wakil Bupati.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terkait system detail rincian di SIPD agar kegiatan yang akan dilaksanakan bisa tercover anggarannya.
2. Mempercepat proses pencairan
3. Disesuaikan lagi proyeksi anggaran dengan kegiatan yang akan dilakukan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi
Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Pamekasan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	85%					80%				
1		1			Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik							
1		1		1		Persentase peningkatan kompetensi aparatur						
1		1		1	1		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas					



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	85%			80%				
1	1	1	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %	4 dokumen	12 dokumen	300 %
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	75 %	4 dokumen	12 dokumen	300 %
1	1	2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	5 kali	4 kali	5 kali	4 kali	80 %	5 kali	13 kali	260 %
1	1	2	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	85%					80%		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	2	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan yang terlaksana	28 kali	28 kali	28 kali	28 kali	100 %	28 kali	84 kali	300 %
1	1	2	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi SKPD yang terlaksana	14 kali	6 kali	12 kali	6 kali	50 %	12 kali	24 kali	171 %
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD yang tersusun	20 kali	5 kali	18 kali	5 kali	27 %	18 kali	28 kali	140 %
1	1	3		Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	12 kali	9 kali	12 kali	9 kali	75 %	12 kali	30 kali	250 %
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang menginventarisasi barang milik daerah								
					Jumlah barang yang diinventarisir	21 Jenis							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.3.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	85%					80%		
1.1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	36 aparatur	17 aparatur	34 aparatur	17 aparatur	50 %	34 aparatur	68 aparatur	180 %
1.1.3.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi	17 jenis					80%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	55 komponen	37 komponen	50 komponen	37 komponen	74 %	50 komponen	124 komponen	225 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	16 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100 %	15 jenis	45 jenis	281 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	11 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100 %	10 jenis	30 jenis	272 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	5 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100 %	4 jenis	12 jenis	240 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	8 kali	5 kali	6 kali	5 kali	83 %	6 kali	16 kali	200 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang layak fungsi	85%					80%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	2 unit	0 unit	2 unit	0 unit	0 %	2 unit	2 unit	100 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	5 jenis	0 jenis	5 jenis	0 jenis	0 %	5 Jenis	5 jenis	100 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	8 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100 %	7 jenis	21 jenis	260 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	85%					80%		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1300 kali	1200 kali	1200 kali	1200 kali	100 %	1200 kali	3600 kali	276 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	36 kali	36 kali	36 kali	36 kali	100 %	36 kali	108 kali	300 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	85%					80%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang menerima Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 kendaraan	18 kendaraan	18 kendaraan	18 kendaraan	100 %	18 kendaraan	54 kendaraan	270 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	14 ruangan	14 ruangan	14 ruangan	14 ruangan	100 %	14 ruangan	42 ruangan	300 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terehabilitasi	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100 %	11 jenis	33 jenis	300 %
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan yang tersedia	85%					80%		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang terlaksana	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100 %	12 kali	36 kali	300 %
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100 %	2 jenis	6 jenis	300 %
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up DPRD yang terlaksana	1 kali	0 kali	1 kali	0 kali	0 %	1 kali	1 kali	100 %
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	85%					80%		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah administrasi keanggotaan DPRD yang terlaksana	436 kali	304 kali	436 kali	304 kali	69 %	436 kali	740 kali	169 %
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi	436 kali	342 kali	436 kali	342 kali	78 %	436 kali	1120 kali	256 %
		Persentase Pelayanan Anggota DPRD yang tercapai	85%					80%		
		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi	85%					80%		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	85%					80%		
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah agenda penyusunan dan pembahasan perda yang terlaksana	5 kali	3 kali	5 kali	3 kali	60 %	5 Kali	11 kali	220 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terbentuk	19 raperda		16 raperda			16 raperda		
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kajian perundang-undangan yang terlaksana	5 kali	1 kali	3 kali	1 kali	33 %	3 kali	5 kali	100 %
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah tata tertib DPRD yang disusun	1 tatib	1 tatib	1 tatib	1 tatib	100 %	1 tatib	3 tatib	300 %
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase perda dan peraturan DPRD yang di bentuk	85%							
		Jumlah jadwal pembahasan APBD yang dilakukan	1 Perda							
		Jumlah jadwal pembahasan APBD Perubahan yang dilakukan	1 Perda							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah jadwal Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang dilakukan	1 Perda							
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang diputuskan dan direkomendasi	85%							
		Jumlah keputusan DPRD yang dibuat	1 Keputusan DPRD							
		Jumlah Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	1 Rekomendasi DPRD							
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	85%					80%		
	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti BIMTEK	45 anggota	45 anggota	45 anggota	45 anggota	100 %	45 anggota	135 anggota	300 %
	Publikasi dan dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi yang tersusun	10 jenis	5 jenis	10 jenis	5 jenis	50 %	10 jenis	20 jenis	200 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	10 tenaga ahli	10 tenaga ahli	10 tenaga ahli	10 tenaga ahli	100 %	10 tenaga ahli	30 tenaga ahli	300 %
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	7 tenaga ahli	7 tenaga ahli	7 tenaga ahli	7 tenaga ahli	100 %	7 tenaga ahli	21 tenaga ahli	300 %
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terserap dan terhimpun	85%					80%		
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang terlaksana	576 kali	0 kali	480 kali	0 kali	0 %	480 kali	480 kali	83 %
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Usulan Pokok Pikiran Dewan yang terakomodir	45 usulan	0 kali	45 usulan	0 kali	0 %	45 usulan	45 usulan	100 %
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan reses secara berkala (per semester)	135 anggota	135 anggota	135 anggota	135 anggota	100 %	135 anggota	405 anggota	300 %
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang terlaksana	85%					80%		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	300 kali	99 kali	288 kali	99 kali	34 %	288 kali	486 kali	162 %
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas pimpinan DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	85%					80%		
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan tugas anggota DPRD yang terkoordinasi dan terkonsultasikan	168 kali	164 kali	164 kali	164 kali	100 %	164 kali	492 kali	292 %



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut.

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan unsur pendukung urusan pemerintahan disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi											
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik											
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur				80%	85%	90%			33.953.807.720	39.046.878.878	
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas											
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu				80%	85%	90%					



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun				4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen	44.275.000	50.916.250	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun				4 dokumen	4 dokumen	4 Laporan		3 dokumen	50.930.000	58.569.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan				5 kali	5 kali	5 Laporan		4 kali	49.500.000	56.925.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik				80%	85%	90%			28.662.118.519	32.961.436.297	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan yang terlaksana				28 kali	28 kali	28 Dokumen		28 kali	28.442.118.519	32.708.436.297	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi SKPD yang terlaksana				12 kali	14 kali	16 Dokumen		6 kali	55.000.000	63.250.000	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun				18 kali	20 kali	22 Laporan		5 kali	55.000.000	63.250.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun				12 kali	12 kali	12 Dokumen		9 kali	110.000.000	126.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi				80%	85%	90%			164.824.000	189.527.600	
	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi				34 aparatur	36 aparatur	36 orang		17 aparatur	164.824.000	189.527.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi				80%	17 jenis	17 jenis			392.620.602	451.513.692	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Perorangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia				50 komponen	55 komponen	60 Paket		37 komponen	27.499.670	31.624.621	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				15 jenis	16 jenis	17 Paket		15 Jenis	54.998.977	63.248.824	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia				10 jenis	11 jenis	12 Paket		10 jenis	92.913.480	106.850.502	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				4 jenis	5 jenis	6 Paket		4 jenis	159.414.475	183.326.646	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara				6 kali	8 kali	10 Laporan		5 kali	57.794.000	66.643.100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang layak fungsi				80%	85%	90%			856.969.300	985.514.695	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia				2 unit	2 unit	2 unit		0 unit			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi				5 Jenis	5 jenis	7 Unit		0 unit			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi				7 jenis	8 jenis	9 Unit		7 jenis	856.969.300	985.514.695	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia				80%	85%	90%			427.635.756	491.781.119	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia				1200 kali	1300 kali	12 Laporan		1200 kali	157.784.000	181.451.600	
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia				36 kali	36 kali	12 Laporan		36 kali	269.851.756	310.329.519	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik				80%	85%	90%			1.719.092.164	1.976.955.988	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang menerima Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18 kendaraan	20 kendaraan	20 Unit		18 kendaraan	691.901.100	795.686.265	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi				14 ruangan	14 ruangan	14 Unit		14 ruangan	807.335.824	928.436.197	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terehabilitasi				11 jenis	11 jenis	11 Unit		11 jenis	219.855.240	252.833.526	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan yang tersedia				80%	85%	90%			621.497.140	714.721.711	
	Penyelenggaraan Adminstrasi Keuangan DPRD	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang terlaksana				12 kali	12 kali	45 Orang /bulan		12 kali	288.748.790	332.061.109	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan				2 jenis	2 jenis	2 paket		2 jenis	283.256.600	325.745.090	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up DPRD yang terlaksana				1 kali	1 kali	45 Orang		1 kali	49.491.750	56.915.513	
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi				80%	85%	90%			964.345.239	1.108.997.025	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah administrasi keanggotaan DPRD yang terlaksana				436 kali	436 kali	12 Dokumen		304 kali	258.499.439	297.274.355	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi				436 kali	436 kali	12 Laporan		342 kali	705.845.800	811.722.670	
		Persentase Pelayanan Anggota DPRD yang tercapai				80%	85%	90%			23.766.351.712	27.295.080.044	
		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi				80%	85%	90%			23.766.351.712	27.295.080.044	
		Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk				80%	85%	90%			4.860.294.203	5.589.338.333	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah agenda penyusunan dan pembahasan perda yang terlaksana				5 Kali	5 kali	5 dokumen		3 kali	774.950.000	891.192.500	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terbentuk				16 raperda	19 raperda	22 dokumen		12 raperda	2.821.500.000	3.244.725.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kajian perundang-undangan yang terlaksana				3 kali	5 kali	7 dokumen		4 kali	. 557.644.615	641.291.307	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah tata tertib DPRD yang tersusun				1 tatib	1 tatib	1 dokumen		1 tatib	706.199.588	812.129.526	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase anggota DPRD yang ditingkatkan kapsitasnya				80%	85%	90%			3.254.136.573	3.742.257.058	
	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti BIMTEK				45 anggota	45 anggota	45 anggota		45 anggota	2.672.801.973	3.073.722.268	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi yang tersusun				10 jenis	10 jenis	10 dokumen		5 jenis	66.550.000	76.532.500	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia				10 tenaga ahli	10 tenaga ahli	10 orang		10 tenaga ahli	329.991.200	379.489.880	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia				7 tenaga ahli	7 tenaga ahli	7 orang		7 tenaga ahli	184.793.400	. 212.512.410	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terserap dan terhimpun				80%	85%	90%			3.560.726.923	4.094.835.961	
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang terlaksana				480 kali	576 kali	672 laporan		0 kali	1.502.049.808	1.727.357.279	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Usulan Pokok Pikiran Dewan yang terakomodir				45 usulan	45 usulan	45 dokumen		0 kali	54.999.780	63.249.747	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan reses secara berkala (per semester)				135 anggota	135 anggota	135 dokumen		135 anggota	2.003.677.335	2.304.228.935	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang terlaksana				80%	85%	90%			724.488.500	796.937.350	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Pelaksanaan Peyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				288 kali	300 kali	320 dokumen		276 kali	724.488.500	796.937.350	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas pimpinan DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya				80%	85%	90%			11.366.705.515	13.071.711.342	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan tugas anggota DPRD yang terkoordinasi dan terkonsultasikan				164 kali	168 kali	172 dokumen		137 kali	11.366.705.515	13.071.711.342	



2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Masih rendahnya rasa keterwakilan rakyat oleh lembaga DPRD
2. Pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditentukan
3. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan
4. Penataan administrasi yang belum optimal dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja dan kegiatan DPRD dengan pemerintah Daerah secara sinergi

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tercapai /Tidak Tercapai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		90	80	123%	Tercapai
2.	Nilai SAKIP		A	A	A	Tercapai
3.	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terpenuhi		90%	80%	74%	Tidak Tercapai
4.	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		90%	80%	66%	Tidak Tercapai
5.	Persentase Perda dan Peraturan DPRD Yang Terbentuk		90%	80%	84%	Tercapai
6.	Persentase Anggota DPRD Yang Ditingkatkan Kapasitasnya		90%	80%	88%	Tercapai
7.	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Terserap dan Terhimpun		90%	80%	33%	Tidak Tercapai
8.	Persentase Kerjasama Daerah Yang Terlaksana		90%	80%	34%	Tidak Tercapai
9.	Persentase Tugas Pimpinan DPRD Yang Terasiltasi Pelaksanaannya		90%	80%	40%	Tidak Tercapai

Sesuai dengan uraian di atas maka kinerja pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan difokuskan pada



pelayanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang dapat meningkatkan kinerja anggota DPRD.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan Sekretariat Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Adanya penerapan SIPD dalam pelaksanaan Sistem Keuangan Daerah yang dimulai dari proses penganggaran sampai dengan penatausahaan keuangan. Yang mana proses tersebut mengakibatkan adanya keterlambatan proses pencairan kegiatan dan Sub Kegiatan.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam bidang keuangan

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018–2023, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Pamekasan yaitu **“Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Pamekasan, yaitu:

- MISI 1 Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia
- MISI 2 Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya
- MISI 3 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- MISI 4 Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan
- MISI 5 Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, sebagai garda depan urusan unsur pendukung urusan pemerintahan,



yang memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-3 Kabupaten Pamekasan yaitu: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan urusan unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Kompetensi dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan agar mampu merencanakan dan melaksanakan program secara optimal;
2. Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya;
3. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam menunjang kegiatan DPRD.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

1. Peningkatan anggaran, sarana prasarana kantor dan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD;
2. Peningkatan bimbingan dan teknis bagi aparatur guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi kegiatan DPRD.

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Isu Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2023

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menambah rasa keterwakilan rakyat oleh Lembaga DPRD;
2. Menyesuaikan program baru dengan pendanaan yang memadai;



3. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan program kerja dan jadwal yang telah ditetapkan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Rancangan awal RKPD Sekretariat DPRD dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Sekretariat DPRD terdiri dari 1 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan, Urusan Pilihan Sekretariat DPRD terdiri dari 1 program, 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan. Secara lebih jelas, rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.5
Review Terhadap

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Pamekasan

SKPD : Sekretariat DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)					Indeks Pelayanan Publik (IPP)		
			Nilai SAKIP					Nilai SAKIP		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	90%	Rp 39,046,878,878	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	90%	Rp 31,218,328,807
			Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik					Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur					Persentase peningkatan kompetensi aparatur		
			Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang berkualitas					Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang berkualitas		



	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	90%	Rp 166,410,750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	90%	Rp 153,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	Rp 50,916,250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	Rp 51,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 Laporan	Rp 58,569,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 Laporan	Rp 51,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	5 Laporan	Rp 56,925,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	5 Laporan	Rp 51,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	90%	Rp 32,961,436,297	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	90%	Rp 3,714,292,560
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan yang terlaksana	28 Dokumen	Rp 32,708,436,297	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan yang terlaksana	28 Dokumen	Rp 3,303,479,060



	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pertanggungjawaban yang diverifikasi	576 Dokumen	Rp 111,100,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pertanggungjawaban yang diverifikasi	576 Dokumen	Rp 99,000,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi SKPD yang terlaksana	16 Dokumen	Rp 63,250,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi SKPD yang terlaksana	16 Dokumen	Rp 80,133,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD yang tersusun	22 Laporan	Rp 63,250,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Sem esteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD yang tersusun	22 Laporan	Rp 77,242,500
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	12 dokumen	Rp 126,500,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	12 dokumen	Rp 154,438,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Barang milik daerah yang Terinventarisasi	23 Laporan	Rp 22,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Barang milik daerah yang Terinventarisasi	23 Laporan	Rp 20,000,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Jumlah Barang yang di inventarisir	23 Laporan	Rp 22,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Barang yang di inventarisir	23 Laporan	Rp 20,000,000



		, Semua Kelurahan					Semua Kelurahan			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ASN yang terfasilitasi	90%	Rp 189,547,600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ASN yang terfasilitasi	90%	Rp 200,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	36 Orang	Rp 189,547,600	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	36 Orang	Rp 200,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana yang layak fungsi	17 jenis	Rp 451,513,692	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana yang layak fungsi	17 jenis	Rp 485,776,500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	60 Paket	Rp 31,624,621	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	60 Paket	Rp 30,999,700
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	17 Paket	Rp 63,248,824	Penyediaan Peralatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	17 Paket	Rp 31,000,000



	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	12 Paket	Rp 106,850,502	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	12 Paket	Rp 191,276,800
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	6 Paket	Rp 183,326,646	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	6 Paket	Rp 120,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12 Laporan	Rp 66,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12 Laporan	Rp 60,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	10 Laporan	Rp 66,463,100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	10 Laporan	Rp 52,500,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase prasarana yang layak fungsi	90%	Rp 985,514,695	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase prasarana yang layak fungsi	90%	Rp 967,500,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	2 unit	Rp -	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	2 unit	Rp 742,500,000



	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	7 Unit	Rp -	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	7 Unit	Rp 100,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	9 Unit	Rp 985,514,695	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	9 Unit	Rp 125,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	90%	Rp 491,781,119	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	90%	Rp 626,809,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	12 Laporan	Rp 181,451,600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	12 Laporan	Rp 64,035,400
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jasa Non ASN yang disediakan	12 Laporan	Rp 330,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jasa Non ASN yang disediakan	12 Laporan	Rp 238,773,600
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 Laporan	Rp 310,329,519	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 Laporan	Rp 324,000,000



	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	90%	Rp 1,976,955,988	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	90%	Rp 600,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan yang menerima Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Unit	Rp 795,686,265	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan yang menerima Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Unit	Rp 400,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	14 Unit	Rp 928,436,197	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	14 Unit	Rp 100,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terehabilitasi	11 Unit	Rp 252,833,526	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terehabilitasi	11 Unit	Rp 100,000,000
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase layanan keuangan yang tersedia	90%	Rp 714,721,711	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase layanan keuangan yang tersedia	90%	Rp 24,165,950,747



Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang terlaksana	45 Orang/bulan	Rp 332,061,109	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang terlaksana	45 Orang/bulan	Rp 23,864,850,747
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	2 Paket	Rp 325,745,090	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	2 Paket	Rp 250,000,000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Medical Check Up DPRD yang terlaksana	45 Orang	Rp 56,915,513	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Medical Check Up DPRD yang terlaksana	45 Orang	Rp 51,100,000
Layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	90%	Rp 1,108,997,025	Layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	90%	Rp 285,000,000
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah administrasi keanggotaan DPRD yang terlaksana	12 dokumen	Rp 297,274,355	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah administrasi keanggotaan DPRD yang terlaksana	12 dokumen	Rp 35,000,000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi	12 Laporan	Rp 811,722,670	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi	12 Laporan	Rp 250,000,000



	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelayanan Sekertariat DPRD terhadap Anggota DPRD yang tercapai	90%	Rp 27,295,080,044	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelayanan Sekertariat DPRD terhadap Anggota DPRD yang tercapai	90%	Rp 12,444,874,300
			Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi					Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	90%	Rp 5,589,338,333	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	90%	Rp 3,000,000,000
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah agenda penyusunan dan pembahasan perda yang terlaksana	5 dokumen	Rp 891,192,500	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah agenda penyusunan dan pembahasan perda yang terlaksana	5 dokumen	Rp 1,000,000,000
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terbentuk	22 dokumen	Rp 3,244,725,000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terbentuk	22 dokumen	Rp 1,000,000,000
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kajian perundang-undangan yang terlaksana	7 dokumen	Rp 641,291,307	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kajian perundang-undangan yang terlaksana	7 dokumen	Rp 500,000,000
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Jumlah tata tertib DPRD yang tersusun	1 dokumen	Rp 812,129,526	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah tata tertib DPRD yang tersusun	1 dokumen	Rp 500,000,000



		, Semua Kelurahan					Semua Kelurahan			
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase jumlah perda yang dibahas	90%	Rp 82,500,000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase jumlah perda yang dibahas	90%	Rp 75,000,000
	Pembahasan APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jadwal pembahasan APBD yang dilakukan	1 dokumen	Rp 27,500,000	Pembahasan APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jadwal pembahasan APBD yang dilakukan	1 dokumen	Rp 25,000,000
	Pembahasan APBD Perubahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jadwal pembahasan APBD perubahan yang dilakukan	1 dokumen	Rp 27,500,000	Pembahasan APBD Perubahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jadwal pembahasan APBD perubahan yang dilakukan	1 dokumen	Rp 25,000,000
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jadwal pembahasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan	1 dokumen	Rp 27,500,000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jadwal pembahasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan	1 dokumen	Rp 25,000,000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keputusan dan Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	90%	Rp 49,500,000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keputusan dan Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	90%	Rp 40,000,000



	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah keputusan DPRD yang dibuat	1 dokumen	Rp 27,500,000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah keputusan DPRD yang dibuat	1 dokumen	Rp 20,000,000
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	1 dokumen	Rp 22,000,000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	1 dokumen	Rp 20,000,000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	90%	Rp 3,742,257,058	Peningkatan Kapasitas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	90%	Rp 2,037,000,000
	Bimbingan Teknis DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti BIMTEK	45 anggota	Rp 3,073,722,268	Bimbingan Teknis DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti BIMTEK	45 anggota	Rp 1,500,000,000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah publikasi dan dokumentasi yang tersusun	10 dokumen	Rp 76,532,500	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah publikasi dan dokumentasi yang tersusun	10 dokumen	Rp 30,000,000
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	10 orang	Rp 379,489,880	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	10 orang	Rp 315,000,000



	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	7 orang	Rp 212,512,410	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	7 orang	Rp 192,000,000
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang terserap dan terhimpun	90%	Rp 4,094,835,961	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang terserap dan terhimpun	90%	Rp 1,561,999,300
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang terlaksana	672 laporan	Rp 1,727,357,279	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang terlaksana	672 laporan	Rp 200,000,000
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan Pokok Pikiran Dewan yang terakomodir	45 dokumen	Rp 63,249,747	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan Pokok Pikiran Dewan yang terakomodir	45 dokumen	Rp 24,999,300
	Pelaksanaan Reses	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan reses secara berkala (per semester)	135 dokumen	Rp 2,304,228,935	Pelaksanaan Reses	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan reses secara berkala (per semester)	135 dokumen	Rp 1,337,000,000
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kerjasama daerah yang terlaksana	90%	Rp 796,937,350	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kerjasama daerah yang terlaksana	90%	Rp 200,000,000



	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Peyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	320 dokumen	Rp 796,937,350	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Peyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	320 dokumen	Rp 200,000,000
	Fasilitasi Tugas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tugas pimpinan DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	90%	Rp 13,071,711,342	Fasilitasi Tugas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tugas pimpinan DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	90%	Rp 5,530,875,000
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan tugas anggota DPRD yang terkoordinasi dan terkonsultasikan	172 dokumen	Rp 13,071,711,342	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan tugas anggota DPRD yang terkoordinasi dan terkonsultasikan	172 dokumen	Rp 5,530,875,000



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2023 yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2023 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Pamekasan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengadaan gedung kantor	Pamekasan	Jumlah gedung kantor yang dibuat	Rp. 7.000.000.000,-	Diajukan
2.	Wawasan Kebangsaan (Kombinasi narasumber dan Reses)	Pamekasan	Jumlah anggota yang terfasilitasi	Rp. 1.000.000.000,-	Diajukan



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pameksasan Tahun 2023 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas



pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan
Kabupaten Pamekasan

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pamekasan
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta Peningkatan pelayanan infrastruktur	Perekonomian yang Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri Manufaktur Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya.
3.	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta Pengentasan kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian social dan pelestarian nilai-nilai budaya	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Berkualitas dan Merata.



		local	
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Pengelolaan Potensi Sosial, Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta sejahtera
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	
7.	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat jawa timur	

Sumber:

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
5. Rencana Strategis Kabupaten Pamekasan 2018-2023

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Pamekasan, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan unsur pendukung urusan pemerintahan, masuk pada misi ke 3 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Sedangkan, Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan berdasarkan Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2023
1.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan public yang berkualitas		Indeks Pelayanan Publik	$\frac{\text{Nilai F01} + \text{Nilai F02} + \text{Nilai F03}}{\text{Jumlah Unsur}} \times \text{Bobot Perindikator}$ Nilai Per Aspek = $\sum \text{nilai per indikator}$ Nilai Indeks = $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD	Nilai SAKIP	>80-90 (A)	A
			Persentase Pelayanan Anggota DPRD yang tercapai		90%

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023



3.3 Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2023 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan pada tahun 2023 disusun sebanyak 2 program. Penyusunan tersebut sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3. 3
Rumusan Rencana

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Pamekasan
Sekretariat DPRD**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)								
		Nilai SAKIP								
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	31,218,328,807	APBD	90%	34,340,161,688
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik						



						Persentase peningkatan kompetensi aparatur							
						Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang berkualitas							
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	153,000,000	APBD		90%	168,300,000
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	51,000,000	APBD		4 dokumen	56,100,000
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	51,000,000	APBD		4 Laporan	56,100,000



4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	51,000,000	APBD		5 Laporan	56,100,000
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	3,714,292,560	APBD		90%	4,085,721,816
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Orang/Bulan	3,303,479,060	APBD		28 Orang/Bulan	3,633,826,966
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	576 Dokumen	99,000,000	APBD		576 Dokumen	108,900,000
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Dokumen	80,133,000	APBD		16 Dokumen	88,146,300



4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Laporan	77,242,500	APBD		22 Laporan	84,966,750
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	154,438,000	APBD		12 Laporan	169,881,800
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah yang Terinventarisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Laporan	20,000,000	APBD		23 Laporan	22,000,000
4	02	01	2.02	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Laporan	20,000,000	APBD		23 Laporan	22,000,000
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	200,000,000	APBD		90%	220,000,000



4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Orang	200,000,000	APBD		36 Orang	220,000,000
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 jenis	485,776,500	APBD		17 jenis	534,354,150
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Paket	30,999,700	APBD		60 Paket	34,099,670
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Paket	31,000,000	APBD		17 Paket	34,100,000
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	191,276,800	APBD		12 Paket	210,404,480
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	120,000,000	APBD		6 Paket	132,000,000



4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	60,000,000	APBD		12 Laporan	66,000,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	52,500,000	APBD		10 Laporan	57,750,000
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang layak fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	967,500,000	APBD		90%	1,064,250,000
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	742,500,000	APBD		2 unit	816,750,000
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 unit	100,000,000	APBD		7 unit	110,000,000



4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 unit	125,000,000	APBD		9 unit	137,500,000
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	626,809,000	APBD		90%	689,489,900
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	64,035,400	APBD		12 Laporan	70,438,940
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	238,773,600	APBD		12 Laporan	262,650,960
4	02	01	0.08 8889	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	324,000,000	APBD		12 Laporan	356,400,000
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	600,000,000	APBD		90%	660,000,000



4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	400,000,000	APBD		20 Unit	440,000,000
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Unit	100,000,000	APBD		14 Unit	110,000,000
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Unit	100,000,000	APBD		11 jenis	110,000,000
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	24,165,950,747	APBD		90%	26,582,545,822
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 orang/bulan	23,864,850,747	APBD		45 orang/bulan	26,251,335,822



4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 paket	250,000,000	APBD		2 paket	275,000,000
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 orang	51,100,000	APBD		45 orang	56,210,000
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	285,000,000	APBD		90%	313,500,000
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	35,000,000	APBD		12 Dokumen	38,500,000
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	250,000,000	APBD		12 Laporan	275,000,000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelayanan Sekertariat DPRD terhadap Anggota DPRD yang tercapai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	12,444,874,300	APBD		90%	13,689,361,730



						Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	3,000,000,000	APBD		90%	3,300,000,000
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen	1,000,000,000	APBD		5 dokumen	1,100,000,000
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 dokumen	1,000,000,000	APBD		22 dokumen	1,100,000,000
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 dokumen	500,000,000	APBD		7 dokumen	550,000,000
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	500,000,000	APBD		1 dokumen	550,000,000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase jumlah perda yang dibahas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	75,000,000	APBD		90%	82,500,000



4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	25,000,000	APBD	1 dokumen	27,500,000
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	25,000,000	APBD	1 dokumen	27,500,000
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	25,000,000	APBD	1 dokumen	27,500,000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keputusan dan Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	40,000,000	APBD	90%	44,000,000
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	20,000,000	APBD	1 dokumen	22,000,000
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	20,000,000	APBD	1 dokumen	22,000,000



4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	2,037,000,000	APBD		90%	2,240,700,000
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 anggota	1,500,000,000	APBD		45 anggota	1,650,000,000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 dokumen	30,000,000	APBD		10 dokumen	33,000,000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 orang	315,000,000	APBD		10 orang	346,500,000
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 orang	192,000,000	APBD		7 orang	211,200,000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terserap dan terhimpun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	1,561,999,300	APBD		90%	1,718,199,230
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	672 laporan	200,000,000	APBD		672 laporan	220,000,000



4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 dokumen	24,999,300	APBD		45 dokumen	27,499,230
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135 dokumen	1,337,000,000	APBD		135 dokumen	1,470,700,000
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	200,000,000	APBD		90%	220,000,000
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	320 dokumen	200,000,000	APBD		320 dokumen	220,000,000
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas pimpinan DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	5,530,875,000	APBD		90%	6,083,962,500
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	172 dokumen	5,530,875,000	APBD		172 dokumen	6,083,962,500



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan tahun 2023. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD pada tahun 2023. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan tahun 2023.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Sekretariat DPRD berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Sekretariat DPRD berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD pada tahun 2023 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:



Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan
Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja/Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2023	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif						
1	2	3	4		5		6		7		8	
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)										
		Nilai SAKIP										
4	2	1										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25%	7,804,582,202	25%	7,804,582,202	25%	7,804,582,202	25%	7,804,582,201	100%	31,218,328,807
		Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi										
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik										
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur										
		Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang berkualitas										
4	2	1	2.01									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25%	38,250,000	25%	38,250,000	25%	38,250,000	25%	38,250,000	100%	153,000,000
		Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu										
4	2	1	2.01	1								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25%	12,750,000	25%	12,750,000	25%	12,750,000	25%	12,750,000	100%	51,000,000
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah										



4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25%	12,750,000	25%	12,750,000	25%	12,750,000	25%	12,750,000	100%	51,000,000
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	25%	12,750,000	25%	12,750,000	25%	12,750,000	25%	12,750,000	100%	51,000,000
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	25%	928,573,140	25%	928,573,140	25%	928,573,140	25%	928,573,140	100%	3,714,292,560
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25%	825,869,765	25%	825,869,765	25%	825,869,765	25%	825,869,765	100%	3,303,479,060
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	25%	24,750,000	25%	24,750,000	25%	24,750,000	25%	24,750,000	100%	99,000,000
4	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	25%	20,033,250	25%	20,033,250	25%	20,033,250	25%	20,033,250	100%	80,133,000
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran	25%	19,310,625	25%	19,310,625	25%	19,310,625	25%	19,310,625	100%	77,242,500
4	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	25%	38,609,500	25%	38,609,500	25%	38,609,500	25%	38,609,500	100%	154,438,000



4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah yang Terinventarisasi	25%	5,000,000	25%	5,000,000	25%	5,000,000	25%	5,000,000	100%	20,000,000
4	2	1	2.02	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	25%	5,000,000	25%	5,000,000	25%	5,000,000	25%	5,000,000	100%	20,000,000
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	25%	50,000,000	25%	50,000,000	25%	50,000,000	25%	50,000,000	100%	200,000,000
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25%	50,000,000	25%	50,000,000	25%	50,000,000	25%	50,000,000	100%	200,000,000
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi	25%	121,444,125	25%	121,444,125	25%	121,444,125	25%	121,444,125	100%	485,776,500
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	25%	7,749,925	25%	7,749,925	25%	7,749,925	25%	7,749,925	100%	30,999,700
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25%	7,750,000	25%	7,750,000	25%	7,750,000	25%	7,750,000	100%	31,000,000
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	25%	47,819,200	25%	47,819,200	25%	47,819,200	25%	47,819,200	100%	191,276,800
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	25%	30,000,000	25%	30,000,000	25%	30,000,000	25%	30,000,000	100%	120,000,000
4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	25%	15,000,000	25%	15,000,000	25%	15,000,000	25%	15,000,000	100%	60,000,000
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25%	13,125,000	25%	13,125,000	25%	13,125,000	25%	13,125,000	100%	52,500,000



4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang layak fungsi	25%	241,875,000	25%	241,875,000	25%	241,875,000	25%	241,875,000	100%	967,500,000
4	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	25%	185,625,000	25%	185,625,000	25%	185,625,000	25%	185,625,000	100%	742,500,000
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	25%	25,000,000	25%	25,000,000	25%	25,000,000	25%	25,000,000	100%	100,000,000
4	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	25%	31,250,000	25%	31,250,000	25%	31,250,000	25%	31,250,000	100%	125,000,000
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	25%	156,702,250	25%	156,702,250	25%	156,702,250	25%	156,702,250	100%	626,809,000
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	25%	16,008,850	25%	16,008,850	25%	16,008,850	25%	16,008,850	100%	64,035,400
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	25%	59,693,400	25%	59,693,400	25%	59,693,400	25%	59,693,400	100%	238,773,600
4	2	1	0.09	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	25%	81,000,000	25%	81,000,000	25%	81,000,000	25%	81,000,000	100%	324,000,000
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	25%	150,000,000	25%	150,000,000	25%	150,000,000	25%	150,000,000	100%	600,000,000



4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25%	100,000,000	25%	100,000,000	25%	100,000,000	25%	100,000,000	100%	400,000,000
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25%	25,000,000	25%	25,000,000	25%	25,000,000	25%	25,000,000	100%	100,000,000
4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25%	25,000,000	25%	25,000,000	25%	25,000,000	25%	25,000,000	100%	100,000,000
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan yang tersedia	25%	6,041,487,687	25%	6,041,487,687	25%	6,041,487,687	25%	6,041,487,687	100%	24,165,950,747
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25%	5,966,212,687	25%	5,966,212,687	25%	5,966,212,687	25%	5,966,212,687	100%	23,864,850,747
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	25%	62,500,000	25%	62,500,000	25%	62,500,000	25%	62,500,000	100%	250,000,000
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti <i>medical check up</i> DPRD	25%	12,775,000	25%	12,775,000	25%	12,775,000	25%	12,775,000	100%	51,100,000
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	25%	71,250,000	25%	71,250,000	25%	71,250,000	25%	71,250,000	100%	285,000,000
4	2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	25%	8,750,000	25%	8,750,000	25%	8,750,000	25%	8,750,000	100%	35,000,000



4	2	1	2.16	3	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	25%	62,500,000	25%	62,500,000	25%	62,500,000	25%	62,500,000	100%	250,000,000
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD yang tercapai	25%	3,111,218,575	25%	3,111,218,575	25%	3,111,218,575	25%	3,111,218,575	100%	12,444,874,300
						Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi										
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	25%	750,000,000	25%	750,000,000	25%	750,000,000	25%	750,000,000	100%	3,000,000,000
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentuka peraturan daerah	25%	250,000,000	25%	250,000,000	25%	250,000,000	25%	250,000,000	100%	1,000,000,000
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil rancangan peraturan daerah	25%	250,000,000	25%	250,000,000	25%	250,000,000	25%	250,000,000	100%	1,000,000,000
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	25%	125,000,000	25%	125,000,000	25%	125,000,000	25%	125,000,000	100%	500,000,000
4	2	2	2.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	25%	125,000,000	25%	125,000,000	25%	125,000,000	25%	125,000,000	100%	500,000,000
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase jumlah perda yang dibahas	25%	18,750,000	25%	18,750,000	25%	18,750,000	25%	18,750,000	100%	75,000,000
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	25%	6,250,000	25%	6,250,000	25%	6,250,000	25%	6,250,000	100%	25,000,000
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD perubahan	25%	6,250,000	25%	6,250,000	25%	6,250,000	25%	6,250,000	100%	25,000,000



4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	25%	6,250,000	25%	6,250,000	25%	6,250,000	25%	6,250,000	100%	25,000,000
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keputusan dan Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	25%	10,000,000	25%	10,000,000	25%	10,000,000	25%	10,000,000	100%	40,000,000
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumwn Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	25%	5,000,000	25%	5,000,000	25%	5,000,000	25%	5,000,000	100%	20,000,000
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	25%	5,000,000	25%	5,000,000	25%	5,000,000	25%	5,000,000	100%	20,000,000
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	25%	509,250,000	25%	509,250,000	25%	509,250,000	25%	509,250,000	100%	2,037,000,000
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	25%	375,000,000	25%	375,000,000	25%	375,000,000	25%	375,000,000	100%	1,500,000,000
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hokum daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	25%	7,500,000	25%	7,500,000	25%	7,500,000	25%	7,500,000	100%	30,000,000
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	25%	78,750,000	25%	78,750,000	25%	78,750,000	25%	78,750,000	100%	315,000,000
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	25%	48,000,000	25%	48,000,000	25%	48,000,000	25%	48,000,000	100%	192,000,000
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terserap dan terhimpun	25%	390,499,825	25%	390,499,825	25%	390,499,825	25%	390,499,825	100%	1,561,999,300



4	2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	25%	50,000,000	25%	50,000,000	25%	50,000,000	25%	50,000,000	100%	200,000,000
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	25%	6,249,825	25%	6,249,825	25%	6,249,825	25%	6,249,825	100%	24,999,300
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses	25%	334,250,000	25%	334,250,000	25%	334,250,000	25%	334,250,000	100%	1,337,000,000
4	2	2	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang terlaksana	25%	50,000,000	25%	50,000,000	25%	50,000,000	25%	50,000,000	100%	200,000,000
4	2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	25%	50,000,000	25%	50,000,000	25%	50,000,000	25%	50,000,000	100%	200,000,000
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas pimpinan DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	25%	1,382,718,750	25%	1,382,718,750	25%	1,382,718,750	25%	1,382,718,750	100%	5,530,875,000
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25%	1,382,718,750	25%	1,382,718,750	25%	1,382,718,750	25%	1,382,718,750	100%	5,530,875,000



BAB V PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2023.

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Sekretariat DPRD sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2023 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD di Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, Juli 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PAMEKASAN



MASRUKIN, S.Sos., M.Si

NIP. 19691104 199003 1 005

Pembina Utama Muda



Pemerintah
Kabupaten pamekasan